

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian* (Edisi revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Astuti Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jatianton, D. (2013). *Pariwisata Indonesia antara peluang dan tantangan*. Pustaka Belajar.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmojo, S. (2010). *Prromosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rekacipta.
- Nuryanti, nuryanti. (1993). *Concept Perspective and challengs*.
- Prapita, E. D. (2018). *Pengembangan Desa Wisata*. Surakarta: Graha Primantama Selaras.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sidiq, U., & Miftahul Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Suprijanto. (2007). *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryana, S. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat*. Tidak Diterbitkan.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Zebua, M. (2016). *Inspirasi pengembangan pariwisata*. depublish.

Sumber Jurnal

- Banuara, R. (2017). Peran Pemuda Dalam Pengembangan Daerah Pada Bidang Sosial Budaya dan ekonomi di Kabupaten Dairi. *Jurnal Educandum*, 10(1), 77.
- Ibori, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. *Governance*, 5(1).
- karwati.L.(2016) Sikap Dan Partisipasi Pedagang Dalam Memelihara Kebersihan Lingkungan. Ournal Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah. Volume 1.Issue 1
- Kisworo, N. S. (2014). Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa (studi Pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa). *journal of nonformal education and Community Empowerment*, 3(2), 45.
- Murdiyanto, eko. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng. *jurnal SEPA*, 7(2) 91-101.
- Novitasari Nastiti, (2020) Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Muda Berdaya Literasi Pada Kampung Sinau Kota Malang. *Jurnal Akrab*. Volume XI Edisi 2
- Nur Rahmawati, S., & dkk. (t.t.). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan margaluyu Kecamatan Cicurug. *Social Work Jurnal Universitas Padjadjaran*, 5(1).
- Nuring Laksana, S. (2013). Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga di Desa badung Keecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1), 56–67.
- Priasukmana, S., & Mulyadin, R. M. (2001). Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Ekonomi Daerah. *Jurnal Info Sosial Ekonomi*, 2(1).
- Rachmansyah, R. E., Afifuddin, A., & Widodo, R. P. (2020). PERAN KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANORAMA JURANG TOLEH (Studi Pada Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Malang). *Respon Publik*, 14(1), 90-100.
- Syamsi, Syahrul. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 3(1) 21-28.
- Urmila Dewi, M. H. (2013). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Jatiluwih Tubanan Bali*. *Jurnal Kawistara*, 3(2).

Sumber Skripsi

Sora Oktiani. (2021) Potensi Desa Sesaot Sebagai Desa Wisata Industri Dalam Mendukung

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Desa No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Desa Wisata

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-undang No.77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan